

Efektivitas Komunikasi Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kota Tasikmalaya

Neng Gina Awaliah¹, Demisa Aulia², Muhamad Aldi Khoirul Fazmi³, Nazwa Azahra Millah⁴, Akmal Ilham Mutakkin⁵, Dinar Nurul Falah⁶, Andi⁷

Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia
 email: nengginaawaliah006@email.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 04-07-2026

Revised : 15-07-2026

Accepted : 25-07-2026

KEYWORDS

Government Communication; Flood Management; Interagency Coordination; Community Participation; Disaster Mitigation.

KATA KUNCI

Komunikasi
 Pemerintah;
 Pengelolaan Banjir;
 Koordinasi
 Antarlembaga;
 Partisipasi Masyarakat;
 Mitigasi Bencana.

ABSTRACT

Floods are a frequent disaster in the city of Tasikmalaya and have an impact on community activities, the economy, and the environment. Flood management requires not only infrastructure development but also effective government communication to support interagency coordination and community participation. This study aims to analyze the effectiveness of government communication in flood management in Tasikmalaya City, identify the forms of communication used, and identify the obstacles encountered in the flood management process. The study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Research informants included the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the Public Works and Spatial Planning Agency (PUTR), and the Environmental Agency (DLH) of Tasikmalaya City. The results indicate that government communication in flood management is relatively effective through interagency coordination carried out via meetings, official letters, joint field surveys, and digital communication channels such as the "Sinergi Team" WhatsApp group. Communication with the community is carried out through outreach, disaster mitigation education, and waste management programs that encourage the formation of active waste banks. However, there are still obstacles, including suboptimal long-term inter-agency coordination, low awareness among some members of the public regarding environmental cleanliness, and limited human resources within the DLH's outreach team. Consequently, government communication plays a crucial role in supporting coordination, information exchange, decision-making, and public participation, thereby contributing to the effectiveness of flood management in Tasikmalaya City.

ABSTRAK

Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kota Tasikmalaya dan berdampak pada aktivitas masyarakat, perekonomian, serta lingkungan. Pengelolaan banjir tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur, tetapi juga komunikasi pemerintah yang efektif untuk mendukung koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas komunikasi pemerintah dalam pengelolaan banjir di Kota Tasikmalaya, mengidentifikasi bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pengelolaan banjir. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan

penelitian terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah dalam pengelolaan banjir tergolong cukup efektif melalui koordinasi antarlembaga yang dilakukan dengan pertemuan, surat resmi, survei lapangan bersama, serta media komunikasi digital berupa grup WhatsApp Tim Sinergi. Komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui penyuluhan, edukasi mitigasi bencana, dan program pengelolaan sampah yang mendorong terbentuknya bank sampah aktif. Namun, masih terdapat hambatan berupa koordinasi jangka panjang antarlembaga yang belum optimal, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta keterbatasan sumber daya manusia pada tim penyuluhan DLH. Dengan demikian, komunikasi pemerintah berperan penting dalam mendukung koordinasi, pertukaran informasi, pengambilan keputusan, dan partisipasi masyarakat sehingga berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan banjir di Kota Tasikmalaya.

1. Pendahuluan

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta pelayanan publik. Meningkatnya intensitas curah hujan, perubahan tata guna lahan, dan keterbatasan sistem drainase menyebabkan kejadian banjir di kawasan perkotaan semakin sering terjadi. Oleh karena itu, penanggulangan banjir tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur, tetapi juga komunikasi pemerintah yang efektif untuk mendukung koordinasi antarinstitusi, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan pengambilan keputusan yang cepat.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang mengalami banjir secara berulang. Berdasarkan data BPBD Kota Tasikmalaya, beberapa wilayah seperti Kecamatan Tawang, Cihideung, dan Cipedes menjadi kawasan yang paling sering terdampak banjir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banjir telah menjadi persoalan yang memerlukan penanganan secara terpadu, termasuk melalui penguatan komunikasi pemerintah dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

Komunikasi pemerintah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kebencanaan, membangun koordinasi lintas organisasi, serta mendorong partisipasi masyarakat. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi, lemahnya koordinasi antarinstitusi, dan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat sehingga penanganan banjir menjadi kurang optimal.

Tabel 1. Titik Wilayah yang Sering Terdampak Banjir di Kota Tasikmalaya

No	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan
1	Puskesmas Kahuripan	Kahuripan	Tawang
2	Jl. Perintis Kemerdekaan (Padayungan), Jl. HZ Mustofa (Asia Plaza)	Tagujaya	Cihideung
3	Jl. Perumnas Cisalak	Nagarasari	Cipedes
4	Leuwianyar	Sukamanah	Tawang
5	Kawasan Cikalang (Pesantren Al-Huda)	Cikalang	Cipedes
6	Belokan JHC Jl. Moch Hatta	Sukamanah	Cipedes
7	Beberapa titik genangan	Cilembang	Cihideung
8	Jl. Paseh (Sungai Cibadodon)	Tuguraja	Cihideung

(Sumber: Hasil Wawancara dengan BPBD Kota Tasikmalaya, 2026)

Fenomena tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan BPBD Kota Tasikmalaya yang menunjukkan bahwa lokasi-lokasi pada Tabel 1 merupakan wilayah yang berulang kali terdampak banjir, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi (BPBD Kota Tasikmalaya, 2026). Kondisi tersebut juga didukung oleh berbagai pemberitaan sepanjang tahun 2026. Pada Januari 2026, banjir menggenangi Jalan Sutisna Senjaya di Kecamatan Tawang hingga mengganggu arus lalu lintas akibat kapasitas drainase yang tidak mampu menampung debit air hujan (TribunPriangan.com, 2026). Selanjutnya, pada 29 Maret 2026, BPBD Kota Tasikmalaya mencatat 12 kejadian bencana yang didominasi oleh enam kejadian banjir di kawasan permukiman akibat hujan deras disertai angin kencang dan petir (NewsTasikmalaya.com, 2026a). Pada awal April 2026, banjir kembali merendam sejumlah ruas jalan utama, seperti Jalan H.Z. Mustofa, Jalan Siliwangi, Jalan BKR, Jalan Moch. Hatta, Jalan Nagawangi, kawasan Cikalang, serta Jalan Cempaka Warna di Kelurahan Cilembang, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan lalu lintas (NewsTasikmalaya.com, 2026b). Konsistensi kejadian banjir di lokasi-lokasi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan banjir di Kota Tasikmalaya masih terjadi secara berulang sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga didukung oleh komunikasi pemerintah yang efektif dalam penyampaian informasi, koordinasi antarinstansi, dan melibatkan masyarakat.

Berulangnya kejadian banjir di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti normalisasi sungai dan peningkatan kapasitas drainase, tetapi juga memerlukan tata kelola pemerintahan yang efektif, khususnya dalam aspek komunikasi. Komunikasi pemerintah menjadi instrumen penting dalam menyampaikan informasi kebencanaan, memberikan peringatan dini, mengoordinasikan tindakan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta membangun partisipasi dan kepercayaan masyarakat selama tahapan mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Penyampaian informasi yang terlambat, tidak konsisten, atau kurang jelas dapat menghambat proses pengambilan keputusan, memperlambat koordinasi antarinstansi, dan menurunkan

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi pemerintah menjadi salah satu faktor strategis yang menentukan keberhasilan penanganan banjir serta penting untuk dikaji dalam rangka mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komunikasi pemerintah dalam penanganan banjir dapat dianalisis menggunakan Model Komunikasi Lasswell yang menjelaskan bahwa proses komunikasi mencakup unsur komunikator, pesan, saluran, penerima, dan efek komunikasi (Aziz, 2023; Redi Panuju, 2018). Efektivitas komunikasi menurut (Wilbur Schramm, 1954) ditentukan oleh terciptanya kesamaan pemahaman (*commonness*) antara komunikator dan komunikan sehingga pesan dapat dipahami sesuai tujuan penyampaiannya. Dalam konteks kebencanaan, komunikasi berperan sebagai sarana penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab untuk mendukung mitigasi, koordinasi, serta pengambilan keputusan masyarakat sebagaimana sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, komunikasi organisasi menjadi dasar koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyampaikan informasi, membagi tugas, dan mengambil keputusan secara efektif sehingga penanganan banjir dapat berlangsung secara terpadu (Redi Panuju, 2018).

Berulangnya kejadian banjir tersebut menunjukkan bahwa permasalahan banjir di Kota Tasikmalaya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hidrometeorologi, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas infrastruktur drainase, pengelolaan lingkungan, efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam situasi bencana, komunikasi pemerintah menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penanggulangan bencana karena berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, koordinasi, edukasi, peringatan dini, serta pembangunan kepercayaan publik. Komunikasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi, kesalahpahaman, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan terhadap (Aziz, 2023).

Kajian mengenai komunikasi pemerintah dalam penanggulangan bencana telah berkembang dalam

beberapa tahun terakhir. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga, kecepatan penyampaian informasi, kualitas pesan, pemanfaatan media digital, serta kemampuan pemerintah membangun kepercayaan masyarakat (Anggraeni, t.t.; Aziz, 2023; Darmadi, 2021). Penelitian lain menegaskan bahwa media sosial telah menjadi sarana komunikasi publik yang penting dalam penanggulangan bencana, namun implementasinya masih didominasi komunikasi satu arah sehingga partisipasi masyarakat belum optimal (Arkania dkk., 2025; Sabrina, 2025). Di sisi lain, penelitian mengenai koordinasi lintas OPD menunjukkan bahwa komunikasi internal pemerintah telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh komunikasi publik yang efektif kepada masyarakat (Septi Dwi Wulandari & Rahmat Salam, 2022). Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi, seperti WhatsApp, QR Code, maupun aplikasi kebencanaan, juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas penyebaran informasi apabila didukung oleh tata kelola komunikasi yang terintegrasi (Cita, Ardiensyah, Zahrati, 2026; Nursanti, t.t.).

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian terdahulu menitikberatkan pada komunikasi krisis saat tanggap darurat, koordinasi internal pemerintah, atau pemanfaatan media sosial dalam penanggulangan bencana. Penelitian tersebut belum mengintegrasikan dimensi komunikasi internal pemerintah, komunikasi publik kepada masyarakat, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemanfaatan berbagai media komunikasi, serta persepsi masyarakat dalam satu kerangka evaluasi efektivitas komunikasi pemerintah pada seluruh tahapan penanganan banjir, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana (Anggraeni, t.t.; Aziz, 2023; Septi Dwi Wulandari & Rahmat Salam, 2022). Selain itu, belum terdapat penelitian yang menguji model tersebut pada konteks Kota Tasikmalaya, padahal kota ini merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang mengalami kejadian banjir berulang dengan karakteristik permasalahan yang dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur drainase, tata kelola lingkungan, dan dinamika komunikasi antarlembaga serta komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas

komunikasi pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis efektivitas komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui pendekatan yang mengintegrasikan komunikasi internal pemerintah, komunikasi publik kepada masyarakat, koordinasi lintas OPD, pemanfaatan berbagai media komunikasi, serta persepsi masyarakat dalam mengevaluasi efektivitas komunikasi pada seluruh tahapan penanganan banjir. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik komunikasi pemerintah daerah dalam penanganan banjir, sekaligus memperkaya kajian komunikasi pemerintahan pada konteks kebencanaan di tingkat daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas komunikasi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penanganan banjir, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi tersebut, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah dalam mendukung penanggulangan banjir yang lebih efektif. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi pemerintahan dan komunikasi kebencanaan, khususnya mengenai efektivitas komunikasi pemerintah daerah dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memperkuat sistem komunikasi kebencanaan, meningkatkan koordinasi lintas OPD, mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi, serta membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Paradigma konstruktivisme dipilih karena penelitian ini berupaya memahami realitas mengenai efektivitas komunikasi pemerintah dalam penanganan banjir berdasarkan pengalaman, pandangan, serta interpretasi para informan yang terlibat secara langsung. Paradigma ini menjadi pijakan penelitian untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana efektivitas komunikasi pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Tasikmalaya dipahami dan diimplementasikan oleh

para pihak yang terlibat. Sementara itu, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti tanpa melakukan pengujian hipotesis.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode naturalistik, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting) sehingga peneliti dapat memperoleh data sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Data penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi wilayah terdampak banjir serta proses komunikasi pemerintah dalam penanganannya. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang terdiri atas pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, serta masyarakat yang pernah mendapatkan penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan dan pencegahan banjir dari DLH Kota Tasikmalaya. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui pengumpulan dokumen, laporan, foto, serta arsip yang berkaitan dengan penanganan banjir di Kota Tasikmalaya.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahapan analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas komunikasi pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Tasikmalaya.

3. Hasil dan Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara mendalam yang telah dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan, meliputi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta elemen masyarakat di wilayah-wilayah terdampak, diperoleh pemahaman komprehensif bahwa bencana banjir di Kota Tasikmalaya merupakan persoalan multidimensional yang sangat kompleks. Bencana hidrometeorologi ini tidak semata-merta terjadi semata-mata karena akumulasi tingginya curah hujan sebagai faktor fenomena alam

absolut, melainkan tereskalasi oleh serangkaian interaksi antara penurunan fungsi kapasitas fisik infrastruktur perkotaan dan dinamika aktivitas sosial masyarakat yang belum ramah lingkungan.

Hasil penggalan data di lapangan mengonfirmasi bahwa keterbatasan daya tampung sistem drainase di Kota Tasikmalaya disebabkan oleh pendangkalan masif akibat sedimentasi lumpur yang mengendap sekian lama tanpa pemeliharaan berkala yang optimal. Keadaan tersebut diperparah oleh adanya hambatan mekanis dalam saluran, di mana bentangan utilitas seperti jalur pipa jaringan air minum serta instalasi kabel telekomunikasi dipasang secara melintang di dalam rongga drainase. Keberadaan fisik jaring-jaring utilitas ini secara langsung mengurangi penampang basah saluran dan sekaligus menangkap material sampah yang terbawa arus. Selain faktor fisik saluran, maraknya alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman padat serta kebiasaan buruk sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan semakin melipatgandakan risiko luapan air saat hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan perkotaan.

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, BPBD Kota Tasikmalaya menegaskan posisi strategisnya bukan sebagai eksekutor tunggal, melainkan sebagai simpul koordinator utama dalam mengkonsolidasikan kerja sama inter-organisasional. Penanganan bencana banjir di daerah ini melibatkan pembagian peran yang mencakup Dinas PUTR, DLH, jajaran pemerintah tingkat kecamatan hingga kelurahan, unsur TNI dan Polri, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan sinergi antar-lembaga ini ditopang oleh dua alur komunikasi yang berjalan sejajar, yaitu komunikasi kedinasan formal dan komunikasi tanggap cepat berbasis media digital. Komunikasi formal direalisasikan melalui instrumen rapat koordinasi berkala, penyampaian surat resmi, dan pelaksanaan kegiatan inspeksi atau survei lapangan bersama. Sementara itu, akselerasi penyampaian data dan informasi kondisi darurat dilaporkan dan direspons secara real-time melalui grup aplikasi percakapan instan yang dinamakan grup WhatsApp Tim Sinergi. Saluran digital ini memangkas sekat birokrasi sehingga konsolidasi personil dan tindakan teknis pascabencana dapat dilakukan secara instan. Meskipun mekanisme komunikasi darurat dinilai sangat responsif, proses penanganan fisik banjir jangka panjang masih membentur tembok tantangan

struktural yang signifikan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah adanya fragmentasi kewenangan atas tata kelola sungai dan jaringan drainase.

Tidak semua badan air dan saluran pembuangan utama yang melintasi wilayah kota berada di bawah yurisdiksi pemerintah daerah setempat. Sebagai contoh nyata, aliran Sungai Cikalang berada penuh di bawah kewenangan BBWS Citanduy yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sedangkan beberapa ruas jalan protokol beserta sistem drainasenya merupakan aset yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembagian batas kewenangan ini membatasi ruang gerak Dinas PUTR Kota Tasikmalaya untuk melakukan tindakan pemeliharaan, pengerukan, maupun normalisasi secara langsung pada titik-titik rawan banjir seperti di kawasan Puskesmas Kahuripan, Padanyungan, Asia Plaza, Jalan BKR, dan lokasi strategis lainnya sebelum mengantongi izin resmi dan kesepakatan koordinasi antar-instansi. Tantangan operasional lainnya bersumber dari kapasitas internal instansi teknis dan dinamika partisipasi warga. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mengungkapkan adanya keterbatasan kuantitas dan jangkauan sumber daya manusia yang bertugas sebagai pembina dan penyuluh lapangan. Keterbatasan aparatur ini menyebabkan sosialisasi pengelolaan sampah dan edukasi kesiapsiagaan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Di sisi lain, potret partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan sampah berbasis komunitas menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Di Kelurahan Gunung Tandala dan Kelurahan Leuwiliang misalnya, program Bank Sampah yang sebelumnya sempat dibentuk oleh pemerintah serta dibekali bantuan sarana operasional pendukung tidak dapat bertahan lama dan berakhir mangkrak. Kegagalan keberlanjutan program tersebut disebabkan oleh melemahnya komitmen pengelola, rendahnya tingkat kesadaran warga sekitar, serta minimnya motivasi kolektif untuk menjaga konsistensi kegiatan. Kendati demikian, fenomena positif terkait penguatan kapasitas lokal masih dapat dijumpai pada beberapa kelompok masyarakat yang memiliki kepemimpinan akar rumput yang kuat.

Keberadaan Bank Sampah Kembang Hurip di Kelurahan Sukanagara yang diinisiasi oleh kelompok perempuan berhasil membuktikan keberlanjutan pengelolaan sampah mandiri dengan

mengolah sampah anorganik menjadi produk kerajinan serta mengonversi sampah organik dapur menjadi pupuk tanaman. Begitu pula dengan keberadaan Bank Sampah RUMAKAH di Kelurahan Awipari yang mengusung Gerakan Donasi Sampah dan Jelantah, mampu memberikan dampak ekonomi bernilai tambah sekaligus memupuk rasa kepedulian lingkungan warga. Dari sudut pandang masyarakat terdampak, penanganan krisis yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Tim Sinergi dinilai sudah relatif cepat dan cekatan saat bencana terjadi. Namun, warga menyampaikan harapan mendasar agar pemerintah tidak hanya bertindak reaktif pascabencana, melainkan lebih memprioritaskan tindakan preventif yang berkelanjutan melalui pengerukan drainase secara rutin, edukasi publik yang berkesinambungan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke saluran air.

Pembahasan

Pembahasan mengenai penanganan bencana banjir di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa masalah ini merupakan persoalan multidimensional yang sangat kompleks, di mana bencana hidrometeorologi ini tidak terjadi semata-mata karena fenomena alam absolut berupa tingginya curah hujan, melainkan tereskalasi oleh interaksi antara penurunan kapasitas fisik infrastruktur perkotaan dan dinamika aktivitas sosial masyarakat yang belum ramah lingkungan.

Hasil analisis data lapangan mengonfirmasi bahwa keterbatasan daya tampung sistem drainase di Kota Tasikmalaya disebabkan oleh pendangkalan masif akibat sedimentasi lumpur yang mengendap sekian lama tanpa pemeliharaan berkala. Keadaan tersebut diperparah oleh hambatan mekanis dalam saluran, di mana bentangan utilitas seperti pipa jaringan air minum dan instalasi kabel telekomunikasi dipasang melintang di dalam rongga drainase, sehingga mengurangi penampang basah saluran sekaligus menangkap material sampah yang terbawa arus. Selain faktor fisik saluran, maraknya alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman padat serta kebiasaan buruk sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan semakin melipatgandakan risiko luapan air saat hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan perkotaan.

Untuk mengurai dinamika penanganan krisis tersebut, proses komunikasi pemerintah dapat

dibedah terlebih dahulu menggunakan Teori Model Komunikasi (Poppy Ruliana; Puji Lestari, 2021). yang mencakup lima unsur utama, yaitu *who*, *says what*, *in which channel*, *to whom*, dan *with what effect*. Unsur *who* atau komunikator diwakili oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya yang menegaskan posisi strategisnya bukan sebagai eksekutor tunggal, melainkan sebagai simpul koordinator utama dalam mengkonsolidasikan kerja sama inter-organisasional. Unsur *says what* berupa pesan yang disampaikan mencakup informasi kondisi darurat/krisis secara real-time serta pesan edukasi pengelolaan sampah dan kesiapsiagaan. Unsur *in which channel* diwujudkan melalui dua alur yang berjalan sejajar, yaitu komunikasi kedinasan formal (rapat koordinasi berkala, surat resmi, dan survei lapangan bersama) serta komunikasi tanggap cepat berbasis media digital berupa grup WhatsApp Tim Sinergi. Unsur *to whom* atau penerima pesan mencakup jajaran instansi teknis (Dinas PUTR, DLH, kecamatan, kelurahan, TNI, Polri, BBWS Citanduy, dan Pemprov Jabar) serta elemen masyarakat di wilayah terdampak.

Sementara itu, unsur *with what effect* terlihat dari berhasilnya pemangkasan sekat birokrasi sehingga konsolidasi personel dan tindakan teknis pascabencana dapat dilakukan secara instan. Pemanfaatan aplikasi percakapan instan WhatsApp Tim Sinergi dalam koordinasi darurat ini sejalan dengan temuan (Cita, Ardiensyah, Zahrati, 2026; Septi Dwi Wulandari & Rahmat Salam, 2022), yang mengonfirmasi bahwa WhatsApp sangat efektif sebagai media komunikasi bencana secara real-time, mendukung komunikasi dua arah, dan memotong sekat birokrasi. Keberhasilan komunikasi internal lintas instansi ini juga memperkuat hasil penelitian (Septi Dwi Wulandari & Rahmat Salam, 2022). Di Kota Tangerang Selatan, yang menunjukkan bahwa penggunaan WhatsApp Group dan rapat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mempercepat penyampaian informasi saat terjadi banjir.

Namun demikian, sebagaimana dikaji oleh (Nursanti, t.t.), meskipun penggunaan teknologi komunikasi berbasis digital meningkatkan kecepatan penyampaian informasi, efektivitas komunikasi krisis tetap sangat bergantung pada keandalan saluran resmi untuk menekan potensi misinformasi di tengah masyarakat. Dilihat dari Teori Efektivitas Komunikasi (Wilbur Schramm, 1954), komunikasi yang efektif dicapai apabila

terjadi kesamaan pemahaman (*commonness*) antara pengirim dan penerima pesan yang ditopang oleh kesamaan medan pengalaman (*field of experience*). Dalam kasus Kota Tasikmalaya, kesamaan *field of experience* telah terbangun dengan baik di tingkat internal Tim Sinergi, sehingga pesan kondisi darurat dapat dipahami dan direspons secara presisi.

Namun, pada tingkat edukasi publik, terjadi kesenjangan *field of experience* antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan masyarakat. DLH Kota Tasikmalaya menghadapi keterbatasan kuantitas dan jangkauan sumber daya manusia yang bertugas sebagai pembina dan penyuluh lapangan, sehingga sosialisasi pengelolaan sampah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Akibatnya, pesan mitigasi gagal membentuk pemahaman bersama, yang dibuktikan dengan mangkraknya program Bank Sampah di Kelurahan Gunung Tandala dan Kelurahan Leuwiliang akibat melemahnya komitmen pengelola dan rendahnya kesadaran warga. Kesenjangan komunikasi sosialisasi ini memperkuat hasil penelitian (Anggraeni, t.t.) yang mengemukakan bahwa komunikasi pemerintah sering kali berfokus pada penyampaian data situasi tetapi belum sepenuhnya mampu mencerminkan atau mengubah pemahaman masyarakat terdampak. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Arkana dkk., 2025). yang menegaskan bahwa komunikasi pemerintah cenderung didominasi pola satu arah sehingga interaksi dialogis dengan masyarakat masih terbatas. Selain itu, keterbatasan sosialisasi di Kota Tasikmalaya ini paralel dengan hasil penelitian (Irawan dkk., t.t.) di Kecamatan Cimahi Selatan, yang mengidentifikasi bahwa belum meratanya sosialisasi dan pelatihan mitigasi menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir.

Ditinjau dari perspektif Teori Komunikasi Organisasi, komunikasi berfungsi sebagai sistem pengintegrasian yang menghubungkan berbagai bagian organisasi untuk menciptakan pemahaman bersama, koordinasi, dan efektivitas kerja. Menurut (Redi Panuju, 2018), komunikasi organisasi yang efektif mensyaratkan adanya kejelasan alur komunikasi serta pembagian peran yang harmonis guna mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Di Kota Tasikmalaya, meskipun komunikasi horizontal antar-OPD berjalan sangat responsif saat darurat, proses penanganan fisik jangka panjang masih membentur tembok tantangan struktural berupa

fragmentasi kewenangan atas tata kelola sungai dan jaringan drainase. Tidak semua badan air dan saluran pembuangan utama di Kota Tasikmalaya berada di bawah yurisdiksi pemerintah daerah setempat. Sebagai contoh, aliran Sungai Cikalang berada penuh di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sedangkan beberapa ruas jalan protokol beserta sistem drainasinya merupakan aset yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembagian batas kewenangan ini membatasi ruang gerak Dinas PUTR Kota Tasikmalaya untuk melakukan tindakan pemeliharaan, pengerukan, maupun normalisasi secara langsung pada titik-titik rawan banjir—seperti di kawasan Puskesmas Kahuripan, Padanyungan, Asia Plaza, dan Jalan BKR—sebelum mengantongi izin resmi dan kesepakatan koordinasi antar-instansi.

Hambatan birokrasi akibat tumpang tindih kewenangan ini memvalidasi temuan (Darmadi, 2021) di Kabupaten Luwu Utara, yang mengungkapkan bahwa masalah koordinasi dan tumpang tindih kebijakan antar-tingkat pemerintah menjadi penghambat utama efektivitas penanggulangan bencana. Kondisi ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sabrin (2025) di Kota Medan, yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas lembaga dan belum terintegrasinya sistem penanganan bencana menyebabkan komunikasi krisis dan tindakan penanggulangan pemerintah daerah belum optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan kerangka Teori Komunikasi Bencana, komunikasi kebencanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi saat tanggap darurat, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi, koordinasi, edukasi, dan pemulihan secara berkelanjutan sebelum, saat, dan sesudah bencana. (Aziz, 2023; Republik Indonesia, t.t.). Merumuskan empat pilar komunikasi kebencanaan yang efektif, yaitu Customer Focus, Leadership Commitment, Situational Awareness, dan Media Partnership. Dalam konteks mitigasi berbasis masyarakat di Kota Tasikmalaya, pilar Customer Focus dan kepemimpinan lokal terbukti menjadi kunci keberhasilan. Meskipun beberapa program bentukan pemerintah sempat mangkrak, fenomena positif dijumpai pada kelompok masyarakat yang memiliki kepemimpinan akar rumput yang kuat. Keberadaan Bank Sampah Kembang Hurip di Kelurahan Sukanagara yang diinisiasi kelompok perempuan

serta Bank Sampah RUMAKAH di Kelurahan Awipari dengan Gerakan Donasi Sampah dan Jelantah berhasil membuktikan keberlanjutan pengelolaan sampah mandiri yang memberikan dampak ekonomi sekaligus memupuk kepedulian lingkungan.

Fenomena keberhasilan inovasi mandiri warga lokal ini mencerminkan konsep Bootleg Innovation Behavior yang diteliti oleh (Ding dkk., 2023). Di mana aktivitas penciptaan ide dan kolaborasi dari bawah ke atas (bottom-up) yang tumbuh secara informal mampu bertindak sebagai mekanisme intrinsik yang meningkatkan kinerja kolektif organisasi atau komunitas. Keberhasilan partisipasi berbasis masyarakat ini juga memperkuat model tata kelola partisipatif yang ditawarkan oleh (Grabmaier dkk., 2025) yang menekankan pentingnya membangun ketahanan bencana yang inklusif melalui edukasi dan peningkatan kapasitas kelompok lokal pada fase kesiapsiagaan. Dari sudut pandang masyarakat terdampak, penanganan krisis oleh Pemkot Tasikmalaya melalui Tim Sinergi dinilai sudah cepat saat bencana terjadi, namun warga menaruh harapan mendasar agar pemerintah memprioritaskan tindakan preventif yang berkelanjutan melalui pengerukan drainase rutin, edukasi publik berkesinambungan, dan penegakan hukum yang tegas. Harapan masyarakat akan tindakan preventif terstruktur dan sosialisasi berkelanjutan ini sejalan dengan temuan (Widodo & Permatasari, 2020). Mengenai pentingnya skema sosialisasi bertahap dan terencana dalam program pemerintah.

Selain itu, kelincahan Pemkot Tasikmalaya dalam merespons krisis air banjir menunjukkan pentingnya penerapan strategi manajemen krisis yang adaptif dan fleksibel sebagaimana dijelaskan oleh (Suwandi, 2023). Ke depan, untuk mengatasi hambatan pendangkalan dan koordinasi secara permanen, Pemerintah Kota Tasikmalaya disarankan bertransisi menuju tata kelola berbasis kota pintar (smart city) seperti yang dirancang oleh (Matracia dkk., 2022), yaitu dengan mengintegrasikan data infrastruktur kritis dan sensor pemantauan secara real-time untuk memprediksi serta mencegah luapan air sebelum bencana terjadi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Tasikmalaya telah berjalan cukup baik, terutama pada tahap tanggap darurat melalui

koordinasi lintas instansi yang dipimpin oleh BPBD Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Teori Model Komunikasi Harold Lasswell, unsur komunikator, pesan, saluran komunikasi, sasaran, dan efek komunikasi telah terlaksana secara efektif, terutama melalui pemanfaatan rapat koordinasi, survei lapangan, serta media digital berupa WhatsApp Tim Sinergi yang mampu mempercepat penyampaian informasi dan pengambilan keputusan. Dari perspektif Teori Efektivitas Komunikasi Wilbur Schramm, efektivitas komunikasi telah tercapai pada tingkat internal organisasi karena adanya kesamaan pemahaman antarinstansi, namun belum optimal pada tingkat masyarakat akibat belum meratanya sosialisasi serta keterbatasan sumber daya dalam edukasi pengelolaan sampah dan mitigasi banjir.

Dari sudut pandang komunikasi organisasi, koordinasi horizontal antarperangkat daerah telah berjalan responsif, tetapi efektivitas penanganan jangka panjang masih dipengaruhi oleh fragmentasi kewenangan antara Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy dalam pengelolaan sungai dan drainase. Sementara itu, berdasarkan perspektif komunikasi bencana, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan mitigasi tidak hanya ditentukan oleh komunikasi pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Keberadaan komunitas pengelola bank sampah yang mampu bertahan menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal dan inisiatif masyarakat berperan penting dalam membangun ketahanan terhadap bencana banjir. Dengan demikian, efektivitas komunikasi pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Tasikmalaya telah menunjukkan capaian yang baik pada aspek koordinasi tanggap darurat, namun masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi preventif, edukasi masyarakat, koordinasi lintas kewenangan, serta pengembangan sistem mitigasi berbasis teknologi untuk mewujudkan penanggulangan banjir yang lebih berkelanjutan.

5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu memperkuat komunikasi preventif melalui program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, terencana, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah, pelestarian daerah resapan air, serta kesiapsiagaan menghadapi banjir. Koordinasi lintas instansi juga perlu ditingkatkan melalui penyusunan mekanisme kerja yang lebih

terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BBWS Citanduy agar proses pemeliharaan serta normalisasi sungai dan drainase tidak terhambat oleh perbedaan kewenangan. Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan pendampingan yang berkesinambungan terhadap kelompok masyarakat, seperti bank sampah dan komunitas peduli lingkungan, agar partisipasi masyarakat dalam mitigasi banjir dapat terus berkembang.

Selain itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya disarankan mulai mengembangkan sistem penanggulangan banjir berbasis teknologi melalui konsep smart city, seperti pemanfaatan sistem informasi terintegrasi, sensor pemantauan kondisi drainase, dan sistem peringatan dini untuk meningkatkan kecepatan deteksi serta respons terhadap potensi banjir. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji efektivitas komunikasi pemerintah menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods), sehingga diperoleh pengukuran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh komunikasi pemerintah terhadap tingkat kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi, S.IP., M.Si. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Komunikasi Organisasi yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Bidang Sumber Daya Air (SDA) Kota Tasikmalaya, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya atas kerja sama, dukungan, serta kesediaannya memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Referensi

- Data instansi pemerintah (BPBD Kota Tasikmalaya).
- Republik Indonesia. (t.t.). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.

Journal Artikel

- Anggraeni, S. D. (t.t.). *Evaluasi Tata Kelola Komunikasi Krisis Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Aceh dan Sumatera Tahun 2025*. *Jurnal Humaniora*.
- Arkania, C., Putri, B. A., & Ningrum, D. P. (2025). Komunikasi pemerintah dalam penanganan banjir Sumatra: Analisis respons publik di media sosial. *1*(2).
- Aziz, M. H. (2023). Komunikasi kebencanaan: Peran dan manfaat pada mitigasi. *Communications*, 5(1), 301–316. <https://doi.org/10.21009/communications.5.1.2>
- Cita, Ardiensyah, & Zaharti. (2026). Komunikasi mitigasi bencana berbasis WhatsApp dan QR Code: Systematic literature review tentang sinergi pemerintah lokal dan masyarakat. *Jurnal Tata Pamong*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm>
- Darmadi, D. (2021). Komunikasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 48–63. <https://doi.org/10.15642/jik.2021.11.1.48-63>
- Ding, X., Feng, L., Huang, Y., & Li, W. (2023). The interactive effects of communication network structure and organizational size on task performance in project-based organizations: The mediating role of bootleg innovation behavior. *Buildings*, 14(1), 98. <https://doi.org/10.3390/buildings14010098>
- Grabmaier, I., Bittner, S., Kainz, S., Barrado, C., Bagiyan, V., Bakunts, S., & Zamora, D. (2025). Enhancing community participation in disaster risk management: Recommendations for an inclusive approach. *Open Research Europe*, 5, 50. <https://doi.org/10.12688/openreseurope.18230.1>
- Irawan, D. N., Kushartono, T., & As, Z. A. (t.t.). *Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi*.
- Matracia, M., Saeed, N., Kishk, M. A., & Alouini, M.-S. (2022). Post-disaster communications: Enabling technologies, architectures, and open challenges. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 3, 1177–1205. <https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2022.3192040>
- Nursanti, S. D. (t.t.). *Studi efektivitas komunikasi krisis dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia*.
- Sabrina. (2025). Komunikasi krisis pemerintah daerah Medan dalam menangani bencana banjir: Studi kasus di Kecamatan Medan Maimun. 5. <https://joecy.org/index.php/joecy>
- Septi Dwi Wulandari, & Rahmat Salam. (2022). Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 534–548. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2760>
- Suwandi, S. (2023). Manajemen krisis terkini: Strategi adaptif dalam menghadapi bencana dan tantangan mendadak. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 473. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3490>
- Widodo, A., & Permatasari, D. A. (2020). Strategi komunikasi dalam program Bekasi Smart City. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1). <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3454>
- Internet Website**
- NewsTasikmalaya.com. (2026a, Maret 29). *Kota Tasikmalaya kembali diterjang cuaca ekstrem, banjir mendominasi di enam titik permukiman*. <https://newstasikmalaya.com>
- NewsTasikmalaya.com. (2026b, April 2). *Diguyur hujan lebat, sejumlah ruas jalan di Kota Tasikmalaya terendam banjir*. <https://newstasikmalaya.com>
- TribunPriangan.com. (2026, Januari 2). *Banjir hingga pohon tumbang dan longsor melanda Kota Tasikmalaya*. <https://priangan.tribunnews.com>
- Buku**
- Panuju, R. (2018). *Pengantar studi ilmu komunikasi*. Kencana (Prenadamedia Group).
- Ruliana, P., & Lestari, P. (2021). *Teori komunikasi* (2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Schramm, W. (1954). *The process and effects of mass communication* (Vol. 1). University of Illinois Press.

6. Daftar Pustaka

- Anggraeni, S. D. (t.t.). *Evaluasi Tata Kelola Komunikasi Krisis Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Aceh dan Sumatera Tahun 2025*. *Jurnal Humaniora*.
- Arkania, C., Putri, B. A., & Ningrum, D. P. (2025). *Komunikasi Pemerintah dalam Penanganan Banjir Sumatra: Analisis Respons Publik di Media Sosial*. 01(02).
- Aziz, M. H. (2023). KOMUNIKASI KEBENCANAAN: PERAN DAN MANFAAT PADA MITIGASI. *Communications*, 5(1), 301–316.

- <https://doi.org/10.21009/communications.5.1.2>
- Cita, Ardiensyah, Zahrati,. (2026). *Komunikasi Mitigasi Bencana Berbasis WhatsApp dan QR Code: Systematic Literature Review tentang Sinergi Pemerintah Lokal dan Masyarakat*. 6. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm>
- Darmadi, D. (2021). Komunikasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 48–63. <https://doi.org/10.15642/jik.2021.11.1.48-63>
- Ding, X., Feng, L., Huang, Y., & Li, W. (2023). The Interactive Effects of Communication Network Structure and Organizational Size on Task Performance in Project-Based Organizations: The Mediating Role of Bootleg Innovation Behavior. *Buildings*, 14(1), 98. <https://doi.org/10.3390/buildings14010098>
- Grabmaier, I., Bittner, S., Kainz, S., Barrado, C., Bagiyan, V., Bakunts, S., & Zamora, D. (2025). Enhancing community participation in Disaster Risk Management: Recommendations for an inclusive approach. *Open Research Europe*, 5, 50. <https://doi.org/10.12688/openreseurope.1823.0.1>
- Irawan, D. N., Kushartono, T., & As, Z. A. (t.t.). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI*.
- Matracia, M., Saeed, N., Kishk, M. A., & Alouini, M.-S. (2022). Post-Disaster Communications: Enabling Technologies, Architectures, and Open Challenges. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 3, 1177–1205. <https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2022.3192040>
- NewsTasikmalaya.com. (2026a, Maret 29). Kota Tasikmalaya Kembali Diterjang Cuaca Ekstrem, Banjir Mendominasi di Enam Titik Permukiman. *NewsTasikmalaya.com*. [NewsTasikmalaya.com](https://newstasikmalaya.com). <https://newstasikmalaya.com>
- NewsTasikmalaya.com. (2026b, April 2). Diguyur Hujan Lebat, Sejumlah Ruas Jalan di Kota Tasikmalaya Terendam Banjir. *NewsTasikmalaya.com*. [NewsTasikmalaya.com](https://newstasikmalaya.com). <https://newstasikmalaya.com>
- Nursanti, S. D. (t.t.). *Studi Efektivitas Komunikasi Krisis dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia*.
- Poppy Ruliana; Puji Lestari. (2021). *TEORI KOMUNIKASI* (2nd Edition) [Print Book]. PT Raja Grafindo Persada. (Original work published 2019, PT Raja Grafindo Persada)
- Redi Panuju. (2018). *PENGANTAR STUDI ILMU KOMUNIKASI* (First Edition) [Print Book]. Kencana (Prenadamedia Group). (Original work published 2018, Kencana (Prenadamedia Group))
- Republik Indonesia. (t.t.). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Sabrina. (2025). *Komunikasi Krisis Pemerintah Daerah Medan dalam Menangani Bencana Banjir: Studi Kasus di Kecamatan Medan Maimun*. 5. <https://joecy.org/index.php/joecy>
- Septi Dwi Wulandari & Rahmat Salam. (2022). KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 534–548. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2760>
- Suwandi, S. (2023). MANAJEMEN KRISIS TERKINI: STRATEGI ADAPTIF DALAM MENGHADAPI BENCANA DAN TANTANGAN MENDADAK. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 473. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3490>
- TribunPriangan.com. (2026, Januari 2). Banjir Hingga Pohon Tumbang dan Longsor Melanda Kota Tasikmalaya. *TribunPriangan.com*. [TribunPriangan.com](https://priangan.tribunnews.com). <https://priangan.tribunnews.com>
- Widodo, A., & Permatasari, D. A. (2020). Strategi Komunikasi dalam Program Bekasi Smart City. *ETTISAL : Journal of Communication*, 5(1). <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3454>
- Wilbur Schramm. (1954). *THE PROCESS AND EFFECTS OF MASS COMMUNICATION* (Fourth Printing, Vol. 1) [Print Book]. University of Illinois press. (Original work published 1954, University of Illinois Press)



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).